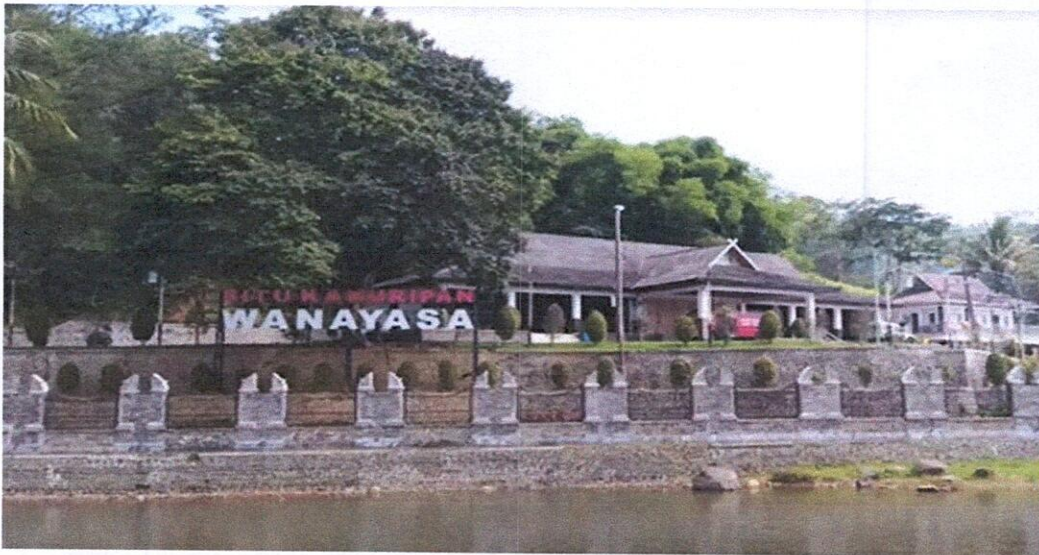




RENCANA KERJA (RENJA)



**KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKATA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 Kecamatan Wanayasa dapat diselesaikan.

RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta evaluasi kinerja atas capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kami kiranya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Wanayasa ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh segenap Stakeholder (pemangku kepentingan) dan dinas instansi terkait lainnya guna menyusun perencanaan dan proyek pembangunan sekaligus merealisasi program-program Pemerintah Kecamatan Wanayasa.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah salah satu bentuk untuk membuktikan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara maksimal dan seoptimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kiranya dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 SKPD Kecamatan Wanayasa ini terdapat kekurangan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Wanayasa, 12 Agustus 2024

CAMAT WANAYASA,



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19760818 199612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RJPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Dan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025. Sejalan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 didalam penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Wanayasa untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

Kecamatan Wanayasa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

- Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026;
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini yaitu sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja setiap tahun berdasarkan capaian indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2025-2026.
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelerasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan Renja Perangkat Daerah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja masing - masing seksi dan urusan serta pendanaan atas program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas penjelasan BAB 1 sampai dengan BAB IV

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Wanayasa

Pada Tahun 2023 jumlah anggaran program dan kegiatan Kecamatan Wanayasa yaitu sebesar Rp. 3.928.525.265 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 3.866.529.465 dan Belanja Modal sebesar Rp. 61.995.800

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja operasi sebesar Rp.3.518.662.325 Atau terserap 91.03 % dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 61.667.000 Atau terserap 99.46 %. Dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2023 hanya 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 2.1

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Wanayasa s/d Tahun 2023

Kecamatan Wanayasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec Wanayasa s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan Wanayasa tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahunn-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.01.6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun, Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an	Jumlah dokumen laporan triwulanan yang disusun	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan milik daerah yang disusun	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	15 stel	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	41 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan alat listrik penerangan bangunan kantor	8 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga	14 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	15 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	4 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi perjalanan dinas yang dsediakan	135 OH	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	6 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah pemenuhan mebelair kantor	3 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan peralatan kantor	3 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pemenuhan jasa pegawai tidak tetap, petugas piket malam, petugas kebersihan dan premi BPJS	15 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	5 Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	15 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan taman yang dipelihara	2 gedung/taman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%

3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3.2.01.1	Peningkatan Partipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek/Sosialisasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan (bimtek/sosialisasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 kegiatan	1 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan produk hukum desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan evaluasi administrasi tata pemerintahan desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap bamusdes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan koordinasi kamtibmas	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.01.12	Jumlah Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban LKD	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengurus LKD	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyusunan RKP Desa	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan wanayasa sesuai indikator tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Wanayasa dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun ke -			
		2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1.	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	100	100	100		95	97	98					
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100		100	100	100					
3.	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	100	100	100		95	95	95					
4.	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	100	100	100		100	100	100					


 CAMAT WANAYASA,
 HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
 NIP. 19760818 199612 1 001

2.3 Isu – Isu Penting Penyelerasan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kinerja indeks kepuasan masyarakat, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran, pembinaan/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengaduan masyarakat tertangani yang tercantum dalam Pencapaian kinerja Kecamatan Wanayasa dijadikan dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, kendala dan tantangan isu – isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Wanayasa. Untuk kemudian isu – isu strategis faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Beberapa isu – isu strategis penyelerasan tugas dan fungsi kecamatan wanayasa antara lain :

1. Masih rendahnya sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan desa;
2. Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan desa;
3. Tersedianya pelayanan teras madukara di Kantor Kecamatan Wanayasa;
4. Tersedianya pelayanan dukcapil di Kantor Kecamatan Wanayasa;
5. Bertambahnya lokasi pariwisata di hilir;
6. Meningkatkan produktivitas sampah;
7. Terbatasnya sumber daya manusia dilingkungan Kantor Kecamatan Wanayasa;
8. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang kantor.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Wanayasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan : merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi Kecamatan :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rincian Tugas Camat :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi vertikal terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :

1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektifitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa.
- i. Melakukan pembinaan, fasilitas, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai azas kewajiban dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan.
 - k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas fungsi Camat;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;

Sekertaris Kecamatan

Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi Perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawian dan urusan administrasi umum kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegaiwan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi umum, naskah dinas, sarana dan prasana kerja, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekertaris :

- a. Menyusun rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pentausahaan keuangan kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawian;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kecamatan;
- g. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan kerumah tanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenan dengan tugas dan fungsi sekretaris;

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atas kegiatan sekretaris kepada camat.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas Pokok : Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta Menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepagawaian dan umum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, Kepegawaian, perlengkapan, perbekelan, keperluan tulis dan Keprotokolan.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan serta melakukan pembinaan fasilitas, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertahanan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan, bangsa, serta perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan wanayasa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya – upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban

umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan Program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitasi social dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya – upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan Melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya local guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/ atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Kecamatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Telah memfasilitasi penetapan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Forum Musrenbang Kecamatan yang telah digelar pada tanggal , melalui kegiatan tersebut diperoleh usulan program dan kegiatan prioritas masyarakat melalui Pemerintah Desa, dan usulan tersebut kemudian disepakati melalui forum musrenbang kecamatan. Selanjutnya, oleh kami berita acara kesepakatan hasil musrenbang tersebut dibawa pada forum musrenbang kabupaten.

Usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kecamatan Wanayasa											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Wanayasa		100%	3,768,000,265	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Wanayasa		100%	3,768,000,265	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	31,390,400	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	31,390,400	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	8,275,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	8,275,900	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	6,231,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	6,231,700	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100%	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100%	5,000,000	

1.4	Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	5,218,100	Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	5,218,100
1.5	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	100%	5,000,000	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	100%	5,000,000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	9,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	9,500,000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	4,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100%	4,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	2,861,783,923	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	2,861,783,923
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,850,083,923	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,850,083,923
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,200,000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,500,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan barang milik daerah	100%	5,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan barang milik daerah	100%	5,600,000

3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan barang milik daerah	100%	5,600,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan barang milik daerah	100%	5,600,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	25,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	25,000,000
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atibut Kelengkapannya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya pemenuhan pakaian dinas	100%	15,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atibut Kelengkapannya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya pemenuhan pakaian dinas	100%	15,000,000
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Wanayasa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 org	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Wanayasa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 org	10,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	106,200,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	106,200,000
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	9,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	9,000,000
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	9,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	9,000,000
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	57,700,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	57,700,000
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	9,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	9,000,000
5.5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	16,500,000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	16,500,000
5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	100%	5,000,000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	40,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	40,000,000
6.1	Pengadaan meubeul	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas hasil pengadaan barang milik daerah	100%	20,000,000	Pengadaan meubeul	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas hasil pengadaan barang milik daerah	100%	20,000,000

6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas hasil pengadaan barang milik daerah	100%	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas hasil pengadaan barang milik daerah	100%	20,000,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	430,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	430,000,000	
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30,000,000	
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	400,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	400,000,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	108,800,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanayasa		100%	108,800,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100%	39,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100%	39,800,000	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100%	9,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100%	9,000,000	
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100%	60,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	100%	60,000,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wanayasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	7,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wanayasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	7,000,000	
9	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	7,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	7,000,000	

9.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	7,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	7,000,000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	18,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	18,000,000	
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	6,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	6,000,000	
10.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	6,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	6,000,000	
11	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	12,000,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Wanayasa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	12,000,000	
11.1	Peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Kecamatan Wanayasa	Jumlah keluarga yang mengikuti pendidikan dan keterampilan	100%	6,000,000	Peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Kecamatan Wanayasa	Jumlah keluarga yang mengikuti pendidikan dan keterampilan	100%	6,000,000	
11.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam perencanaan keluarga	Kecamatan Wanayasa	Jumlah keluarga yang mengikuti pendidikan dan keterampilan	100%	6,000,000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam perencanaan keluarga	Kecamatan Wanayasa	Jumlah keluarga yang mengikuti pendidikan dan keterampilan	100%	6,000,000	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wanayasa	Tingkat Penyelesaian konflik Sosial	100%	6,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wanayasa	Tingkat Penyelesaian konflik Sosial	100%	6,000,000	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Wanayasa	Tingkat Penyelesaian konflik Sosial	100%	6,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Kecamatan Wanayasa	Tingkat Penyelesaian konflik Sosial	100%	6,000,000	
12.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Tingkat Penyelesaian konflik Sosial	100%	6,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	Tingkat Penyelesaian konflik Sosial	100%	6,000,000	

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wanayasa	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi pem um yang dilaksanakan	100%	35,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wanayasa	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi pem um yang dilaksanakan	100%	35,000,000	
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wanayasa	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah	100%	35,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wanayasa	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah	100%	35,000,000	
13.1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahan nasional	100%	35,000,000	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Wanayasa	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahan nasional	100%	35,000,000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wanayasa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	51,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wanayasa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	51,000,000	
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanayasa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	51,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanayasa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	51,000,000	
14.1	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades	100%	6,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades	100%	6,000,000	
14.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pendes	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemdes	100%	6,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemdes	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemdes	100%	6,000,000	
14.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kades dan Perangkat	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kades dan perangkat	100%	6,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kades dan Perangkat	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kades dan perangkat	100%	6,000,000	
14.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamudes	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bamudes	100%	6,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamudes	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bamudes	100%	6,000,000	

14.5	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa	100%	15,000,000	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa	100%	15,000,000	
14.6	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan trantibum	100%	6,000,000	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan trantibum	100%	6,000,000	
14.7	Facilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban LKD	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tupoksi LKD	100%	6,000,000	Facilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban LKD	Kecamatan Wanayasa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tupoksi LKD	100%	6,000,000	



Tabel 2.3

Tabel T-C. 32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun ..
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta**

Kecamatan Wanayasa

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WANAYASA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Kecamatan Wanayasa berpedoman pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Dan RKPD Kabupaten Purwakarta tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Purwakarta Kabupaten Puwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026.

Peraturan Bupati Purwakarta Kabupaten Puwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 dan RPD Tahun 2025 -2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yakni tahap keempat RPJPD.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sudah sesuai dan selaras dengan program – program prioritas nasional di daerah. Dan Renja Kecamatan, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat dipastikan juga telah mengakomodir program – program nasional di daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklature Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program – program nasional yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang direncanakan pada Renja Kecamatan Tahun 2025 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wanayasa

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan, yaitu Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efektif di wilayah Kecamatan serta Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. dengan Sasaran, Meningkatnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui strategi :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja kecamatan.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan sinergi dan soliditas dalam penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan Renja Kecamatan Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan capaian SAKIP Kecamatan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan fungsi pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan dan Desa.
5. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.
6. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan penyelenggara Pemerintahan Desa terhadap amanat Perundang – Undangan.
7. Meningkatkan kualitas produk hukum desa.
8. Meningkatkan kualitas administrasi pengesahan evaluasi dan rekomendasi desa.
9. Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan Kecamatan dan Desa.
10. Meningkatnya soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat.
11. Meningkatnya pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Adapun yang menjadi sasaran Renja Kecamatan Tahun 2025, antara lain :

1. Capaian SAKIP Kecamatan dengan target BB
2. Tercapainya indeks kepuasan masyarakat yang baik

3. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Renstra Kecamatan, Renja Kecamatan, Perdes RKP Desa dan Perdes APBDesa.
5. Meningkatnya frekuensi pembinaan dan fasilitasi tugas – tugas kelembagaan desa (RT, RW, LPM, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Pengurus MUI dan Pengurus LPM).
6. Meningkatnya kedisiplinan dan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran Desa (RKP Desa dan APBDesa).
7. Meningkatnya kedisiplinan dan ketepatan waktu penetapan dokumen pelaporan desa (Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa, SPJ Keuangan Desa, LPPD, LKPJ).
8. Meningkatnya kualitas produk hukum desa (Perdes, Perbes dan Peraturan Kepala Desa) dalam berbagai aspek.
9. Pengesahan produk hukum desa dan pengesahan rekomendasi desa
10. Mendorong perubahan status desa melalui indeks desa membangun dari Desa Berkembang menjadi maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.
11. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan.
12. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian konflik sosial di wilayah kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan OPD Kecamatan Wanayasa merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja OPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan mebel;
 - b. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1. *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
 - a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1. *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*
 - a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 2. *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*
 - a. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
 - b. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga yang Berkualitas

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Wanayasa

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1.** Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - e. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Wanayasa Tahun 2025, dapat dilihat pada 4.1

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Jumlah Anggaran	
				2024	2025
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		3.788.000.265	3.617.383.923
1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			33.390.400	40.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	10.275.900	6.500.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	6.231.700	5.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD	-	5.000.000
1.4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian	5.218.100	5.000.000

			kinerja perangkat daerah		
1.5	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DKA – SKPD	-	5.000.000
1.6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	8.136.000	9.500.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	3.528.700	4.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.943.499.228	2.861.783.923
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.921.874.528	2.850.083.923
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.750.300	8.200.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.874.400	3.500.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.000.000	5.600.000
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.000.000	5.600.000
4	Administrasi Kepegawaian			32.300.000	25.000.000

	Perangkat Daerah				
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Meningkatnya Pemenuhan Pakaian Dinas	32.000.000	15.000.000
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	10.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.415.137	106.200.000
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.733.900	9.000.000
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.546.900	9.000.000
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.664.337	57.700.000
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.750.000	9.000.000
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.720.000	16.500.000
5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	5.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			61.995.800	40.000.000
6.1	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	31.997.000	20.000.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	29.998.000	20.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			474.881.500	430.000.000

7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.952.660	30.000.000
7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	447.928.840	400.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.518.200	108.800.000
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	39.800.000	39.800.000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	7.300.000	9.000.000
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	53.418.200	60.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	7.000.000
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	-	7.000.000
9.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektivitas pemerintahan tingkat kecamatan	-	7.000.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		31.625.000	18.000.000
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.285.000	6.000.000
10.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musrenbang			20.285.000	6.000.000
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			10.800.00	12.000.000

	<i>Tingkat Kecamatan</i>				
11.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			10.800.00	6.000.000
11.2					
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial		-	6.000.000
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pem umum yang dilaksanakan		40.100.000	35.000.000
13	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan</i>	40.100.000	35.000.000
13.1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40.100.000	34.400.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGASAWAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		68.800.000	51.000,000
14	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan</i>	68.800.000	51.000.000
14.1	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades	15.600.000	6.000.000
14.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemdes		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemdes	12.000.000	6.000.000
14.3	Fasilitasi Pelaksanaan		Jumlah dokumen	8.600.000	6.000.000

	Tugas dan Fungsi Kades dan Perangkat Desa		fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kades dan perangkat desa		
14.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamusdes		Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas bamudes	8.400.000	6.000.000
14.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah fasilitasi dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	-	15.000.000
14.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah fasilitasi dokumen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11.000.000	6.000.000
14.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban LKD		Jumlah fasilitasi dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD	13.200.000	6.000.000
Jumlah				3.928.525.265	3.734.383.923

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana dan Program Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2025 ini kami buat, besar harapan kami dengan dibuatnya Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Wanayasa.

Wanayasa, 12 Agustus 2024

CAMAT WANAYASA,



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001